

Analisis Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru di SD Negeri Sumber Sari 1 Malang

Nur Fatkhiya Warda Wasila*, Ali Imron, Aan Fardani Ubaidillah

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: nur.fatkhiya.2001316@students.um.ac.id

Abstract

The purpose of writing this research is to analyze the implementation of the teacher professional allowance policy at SDN Sumber Sari 1 Malang City. This research applies a qualitative approach with a case study method. This research uses data sources in the form of primary and secondary data. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. The results of this research are that the process of implementing the teacher professional allowance policy at SDN Sumber Sari 1 Malang involves several stages involving various parties. The school together with the local education supervisor conducted a needs analysis to assess the extent to which the policy could provide benefits for teachers at the school. This step involves evaluating teacher performance, teaching experience, and educational qualifications as a basis for determining the amount of professional allowances.

Keywords: analysis; policy implementation; teacher professional benefits

Abstrak

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SDN Sumber Sari 1 Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses penerapan kebijakan tunjangan profesi guru di SDN Sumber Sari 1 Malang melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak. Pihak sekolah bersama pengawas pendidikan setempat melakukan analisis kebutuhan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat bagi guru di sekolah tersebut. Langkah ini meliputi evaluasi kinerja guru, pengalaman mengajar, dan kualifikasi pendidikan sebagai dasar penentuan besaran tunjangan profesi.

Kata kunci: analisis; implementasi kebijakan; tunjangan profesional guru

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah fondasi utama dalam perkembangan suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, guru memiliki peran sentral dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda (Aris et al., 2021). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul berbagai isu terkait dengan efektivitas kinerja guru, yang pada gilirannya dapat memengaruhi mutu pendidikan di negara ini. Menurut Kurniawan (2018) salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh besar adalah kebijakan tunjangan profesi guru yang diberikan oleh pemerintah. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan guru, namun, dalam implementasinya, sering kali muncul berbagai masalah yang mempengaruhi efektivitas kinerja guru. Efektivitas kinerja guru sangat erat kaitannya dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, terutama dalam hal yang berkaitan dengan tunjangan untuk guru. Peraturan tersebut memberikan panduan yang jelas tentang kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru agar memenuhi syarat untuk menerima tunjangan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Dengan adanya tunjangan sebagai insentif, guru dapat merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja mereka dalam proses pengajaran. Hal ini dapat mendorong guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka, serta berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi payung hukum yang mengatur tunjangan guru, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong guru untuk menjadi lebih efektif dalam menjalankan tugas pendidikan mereka. Menurut Paisal et al., (2022) masalah utama yang mempengaruhi efektivitas kinerja guru adalah ketidakjelasan dalam kebijakan tunjangan profesi guru. Kebijakan ini sering kali memiliki persyaratan yang rumit dan ketentuan yang ambigu, yang dapat membuat guru merasa bingung dan sulit memahaminya. Selain itu, dana tunjangan yang diterima oleh guru juga sering menjadi sumber ketidakpastian, dan dalam beberapa kasus, guru mungkin mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam menerima tunjangan mereka. Hal ini dapat mengganggu fokus guru pada tugas pengajaran mereka dan mempengaruhi motivasi mereka dalam bekerja (Dahliah, 2020).

Kebijakan tunjangan profesi guru juga dapat mempengaruhi aspek sosial dan profesional dalam dunia pendidikan. Pertama, isu ketidaksetaraan dalam pemberian tunjangan bisa memicu ketidakpuasan di antara guru yang merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil. Kedua, ketika guru merasa terbebani oleh peraturan dan birokrasi yang berbelit-belit dalam mengakses tunjangan, mereka mungkin lebih cenderung untuk terganggu dalam tugas-tugas pengajaran mereka. Masalah-masalah ini, apabila dibiarkan tanpa tindakan, dapat mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah (Yuliani, 2014). Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Menganalisis implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SD Negeri Sumbersari 1 Malang; (2) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SD Negeri Sumbersari 1 Malang; (3) Menganalisis dampak implementasi kebijakan tunjangan profesi guru pada kinerja guru dan pembelajaran di SD Negeri Sumbersari 1 Malang; dan (4) Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SD Negeri Sumbersari 1 Malang.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau peristiwa dalam konteks yang lebih mendalam dan kompleks (Sugiyono, 2017). Studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian ini dilakukan secara mendalam dan terperinci, sehingga peneliti bisa mengenal individu atau sekelompok kecil individu (Harahap, 2020). Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam konteks penelitian, sementara sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau dalam konteks yang berbeda dan kemudian dapat digunakan ulang dalam penelitian (Rukajat, 2018).

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah dan guru sebagai narasumber. Sedangkan, sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berbagai sumber literatur yang digunakan sebagai referensi dan berbagai dokumen lain yang dapat menunjang penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini

menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan model interaktif Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahap utama yaitu reduksi data, display data, dan konklusi/verifikasi atau penarikan kesimpulan. Teknik ini membantu peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam dari data kualitatif dan mengembangkan temuan yang kaya serta relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

3.1.1. Proses Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru

Proses implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SDN Sumbersari 1 Malang melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak. Pihak sekolah bersama dengan pengawas pendidikan setempat melakukan analisis kebutuhan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para guru di sekolah tersebut. Langkah ini melibatkan evaluasi kinerja guru, pengalaman mengajar, dan kualifikasi pendidikan sebagai dasar untuk penentuan besaran tunjangan profesi. Selanjutnya, pihak sekolah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun pedoman pelaksanaan dan penyaluran tunjangan profesi. Proses ini mencakup pengumpulan data pribadi guru, verifikasi dokumen pendukung, dan pemastian bahwa kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah terpenuhi. Selama proses ini, komunikasi efektif antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan guru menjadi kunci untuk memastikan informasi yang akurat dan pemahaman yang baik mengenai kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan tunjangan profesi melibatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pihak sekolah bersama dengan pemerintah daerah harus memastikan bahwa tunjangan profesi disalurkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi terhadap dampak kebijakan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di SDN Sumbersari 1 Malang juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung perkembangan profesionalisme guru dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

3.1.2. Faktor Pendukung atau Penghambat Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru

Beberapa faktor dapat menjadi pendukung atau penghambat implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SDN Sumbersari 1 Malang. Faktor pendukung melibatkan keterlibatan aktif dari pihak sekolah, pengawas pendidikan, dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak ini dapat mempercepat proses verifikasi dan penyaluran tunjangan profesi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SDN Sumbersari 1 Malang seperti birokrasi yang kompleks dan lambat, kurangnya anggaran, serta tidak jelasnya pedoman pelaksanaan kebijakan. Birokrasi yang rumit dapat menyulitkan proses verifikasi dan administrasi, sedangkan keterbatasan anggaran dapat memperlambat penyaluran tunjangan profesi. Selain itu, kurangnya pemahaman atau komunikasi yang tidak efektif antara pihak terkait juga dapat menjadi penghambat, menghambat kesepahaman mengenai ketentuan dan manfaat yang diberikan oleh kebijakan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SDN

Sumbersari 1 Malang adalah perlu adanya koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, upaya untuk mempercepat proses administratif, dan transparansi dalam komunikasi mengenai kebijakan tersebut. Selain itu, pemantauan secara berkala terhadap kendala-kendala yang muncul selama implementasi juga penting untuk memastikan kebijakan dapat memberikan dampak positif bagi guru dan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

3.1.3. Dampak Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru pada Kinerja Guru dan Pembelajaran

Dampak implementasi kebijakan tunjangan profesi guru pada kinerja guru dan pembelajaran di SDN Negeri 1 Summersari, Malang, sangat signifikan. Melalui kebijakan ini, terutama dalam bentuk tunjangan profesi, terlihat peningkatan yang positif dalam kinerja guru. Guru-guru cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen untuk meningkatkan penguasaan kompetensi, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari program sertifikasi guru. Selain itu, implementasi kebijakan ini juga berdampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Guru yang termotivasi dan memiliki kinerja yang baik secara langsung berkontribusi pada suasana pembelajaran yang lebih efektif. Dengan demikian, implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SDN Negeri 1 Summersari Malang memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan dan pembelajaran, meningkatkan kinerja guru, dan secara keseluruhan, memberikan kontribusi positif terhadap prestasi sekolah.

3.1.4. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru

Evaluasi efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SDN Summersari 1 Malang menunjukkan hasil yang positif. Dalam kurun waktu tertentu, terlihat peningkatan kinerja guru dan motivasi mereka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan dana tunjangan profesi guru secara tepat dan transparan juga memperlihatkan efisiensi administrasi, dengan pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi ini melibatkan berbagai indikator, termasuk peningkatan prestasi siswa, partisipasi guru dalam kegiatan pengembangan profesional, dan umpan balik positif dari stakeholders terkait. Dengan demikian, implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SDN Summersari 1 Malang dapat dianggap berhasil dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pembelajaran yang berkualitas.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Proses Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru

Proses implementasi kebijakan tunjangan profesi guru adalah proses yang melibatkan berbagai pihak, seperti guru, operator sekolah, operator dinas, Ditjen GTK, dan Puslapdik. Proses ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai bentuk profesionalisme (Andika dan Pramudiana, 2023). Besaran tunjangan profesi guru berbeda-beda tergantung pada status kepegawaian, tingkatan, masa kerja, dan kualifikasi akademik guru. Besaran tunjangan profesi guru PNS daerah adalah satu kali gaji pokok. Sedangkan, besaran tunjangan profesi guru non PNS ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku (Syuaib, 2023). Menurut Arifin (2022) dalam proses implementasi kebijakan tunjangan profesi guru, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang oleh semua pihak yang

terlibat, yaitu prinsip tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan kepatutan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pengelolaan dan penyaluran tunjangan profesi guru dilakukan secara tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja, dan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya (Endrawati, 2022).

3.2.2. Faktor Pendukung atau Penghambat Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru

Proses implementasi kebijakan tunjangan profesi guru melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor pendukung sering kali melibatkan ketersediaan sumber daya, keterlibatan pemangku kepentingan, dan desain kebijakan yang jelas. Sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran maupun infrastruktur administratif, dapat mempermudah proses administrasi dan penyaluran tunjangan (Hapsari, 2019). Keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk sekolah, pengawas pendidikan, dan pemerintah daerah, juga menjadi kunci keberhasilan implementasi. Sebaliknya, faktor penghambat sering kali terkait dengan birokrasi yang kompleks, kurangnya anggaran, dan tidak jelasnya pedoman pelaksanaan. Faktor-faktor ini dapat menghambat efisiensi proses administratif dan menyulitkan pemahaman serta penerapan kebijakan secara konsisten (Tueno, 2020). Beberapa faktor dapat menjadi pendukung atau penghambat implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SDN Sumbersari 1 Malang. Faktor pendukung melibatkan keterlibatan aktif dari pihak sekolah, pengawas pendidikan, dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak ini dapat mempercepat proses verifikasi dan penyaluran tunjangan profesi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

3.2.3. Dampak Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru pada Kinerja Guru dan Pembelajaran

Tunjangan profesi guru merupakan inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pendidik (Yudha, 2023). Dalam konteks ini, upaya ini terwujud melalui pemberian insentif berupa tunjangan profesi setara dengan satu kali gaji pokok setiap bulan bagi guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik (Rorimpandey, 2020). Tunjangan ini memberikan nilai tambah kepada guru sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kompetensi mereka dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru untuk memberikan yang terbaik dalam tugas mereka serta mendorong upaya peningkatan profesionalisme melalui peningkatan kualifikasi pendidikan (Mulyasa, 2021).

Tunjangan profesi juga diharapkan dapat membantu guru dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, menciptakan stabilitas dalam tenaga pendidik, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Aisyah, 2019). Adanya tunjangan profesi guru tidak hanya sebagai bentuk penghargaan finansial, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan dan motivasi para pendidik (Nawawi, 2022). Tunjangan sertifikasi guru memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kinerja guru. Melalui partisipasi dalam program

pendidikan dan pelatihan sertifikasi, guru tidak hanya meningkatkan penguasaan bidang keahlian mereka, tetapi juga mengembangkan kompetensi yang lebih luas sebagai agen pembelajaran (Runtu & Kalalo, 2021). Program sertifikasi umumnya mencakup peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan mendalami aspek-aspek tersebut, guru dapat memperoleh keterampilan yang lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, memahami kebutuhan dan karakteristik siswa secara holistik, berinteraksi secara efektif dengan masyarakat dan rekan sejawat, serta mengasah keahlian profesional mereka (Kusumawati et al., 2023).

3.2.4. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Implementasi Kebijakan Tunjangan

Profesi Guru

Implementasi kebijakan tunjangan profesi guru dapat dievaluasi dari segi efektivitas dan efisiensi (Madjid, 2018). Evaluasi efektivitas kebijakan tunjangan profesi guru dapat dilakukan dengan memeriksa sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu peningkatan kinerja guru dan kualitas pembelajaran. Sementara itu, evaluasi efisiensi kebijakan tunjangan profesi guru dapat dilakukan dengan memeriksa sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan tersebut dengan penggunaan sumber daya yang efisien (Anisah et al., 2019). Fokus evaluasi mencakup efisiensi program, dengan mengukur penggunaan sumber daya secara efektif, serta pemeriksaan terhadap standar implementasi yang baik untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam pelaksanaan. Evaluasi juga perlu menilai kesesuaian program dengan standar efisien dan efektif, sehingga dapat ditentukan sejauh mana kontribusi program terhadap peningkatan kinerja guru dan kualitas pembelajaran (Octavia, 2019). Secara keseluruhan, evaluasi ini memberikan gambaran holistik dan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan serta memberi arahan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.

4. Simpulan

Proses implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SDN Sumpalsari 1 Malang dimulai dengan tahapan analisis kebutuhan yang melibatkan pihak sekolah dan pengawas pendidikan. Evaluasi kinerja guru, pengalaman mengajar, dan kualifikasi pendidikan menjadi dasar penentuan besaran tunjangan profesi. Langkah selanjutnya melibatkan kerja sama antara pihak sekolah dan pemerintah daerah dalam menyusun pedoman pelaksanaan dan penyaluran tunjangan profesi. Komunikasi yang efektif antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan guru menjadi kunci kesuksesan dalam memastikan pemahaman yang baik mengenai kebijakan. Proses implementasi melibatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan penyaluran tunjangan profesi tepat waktu dan sesuai ketentuan. Faktor pendukung mencakup keterlibatan aktif pihak terkait dan kerja sama yang baik, sementara faktor penghambat melibatkan birokrasi kompleks, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pemahaman terkait kebijakan. Evaluasi efektivitas dan efisiensi menunjukkan dampak positif terhadap kinerja guru dan motivasi mereka. Peningkatan kualitas pembelajaran terlihat melalui kontribusi guru yang termotivasi dan memiliki kinerja baik. Implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SDN Sumpalsari 1 Malang dapat dianggap berhasil dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi, memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan, kinerja guru, dan prestasi sekolah secara keseluruhan.

Daftar Rujukan

- Ade, I., & Idrus, I. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru di SMA Negeri 1 Palu. *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia)*, 1(1), 59-77.
- Aisyah, S. (2019). *Kompensasi dan Komitmen Guru*. PGRI Prov kalbar dan Yudha English Gallery.
- Andika, A. R., & Pramudiana, I. D. (2023). Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 1(2), 111-124.
- Anisah, S., Suprihanto, J., & Wikaningtyas, S. U. (2019). *Evaluasi Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Bersertifikat Pendidik Sekolah Menengah Pertama (Smp) Kementerian Agama Kabupaten Pacitan* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
- Arifin, R. K. (2022). Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 205-216.
- Aris, M., Al Munawwarah, R., Azis, M., & Sani, A. (2021). Pengaruh Tunjangan Sertifikasi, Motivasi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Guru Di Smkn 4 Soppeng. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 1(1).
- Dahliah, D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Tunjangan Kinerja terhadap Motivasi dan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 30-40.
- Endrawati, T. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru di Kota Baubau. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 113-122.
- Hamid, A., Sultraeni, W., & Amalia, R. R. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(1), 58-69.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Kartini, D., & Kristiawan, M. (2019). Pengaruh tunjangan profesi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 25-33.
- Kurniawan, A. (2018). Tunjangan Profesi, Pendidikan Dan Latihan Profesi (PLPG) Dalam Kinerja Guru SMA. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(2), 324-335.
- Kusumawati, I., Lestari, N. C., Sihombing, C., Purnawanti, F., Soemarsono, D. W. P., Kamadi, L., ... & Hanafi, S. (2023). *Pengantar Pendidikan*. CV Rey Media Grafika.
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudra Biru.
- Mustari, N. (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
- Octavia, S. A. (2019). *Sikap dan Kinerja Guru Profesional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Paisal, P., Muhtar, E. A., & Milwan, M. (2022). Analisis Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Tunjangan Guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(2), 455-462.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Ramdhani, A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Rorimpandey, W. H. (2020). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Guru Sekolah Dasar*. Ahlimedia Book
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Sleman: Deepublish.
- Runtu, P. S., & Kalalo, R. R. (2021). *Kompetensi Guru dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada Masa Pandemi Covid-19*. Penerbit NEM.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Suryadi, E., & Yusup, Y. (2023). Analisis tunjangan profesi dan profesionalisme guru dan pengaruhnya terhadap kinerja guru. *Insight Management Journal*, 3(2), 139-152.
- Sugiyono, D. (2017). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syuaib, M. R. (2023). Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi dalam Menunjang Kinerja Guru pada Sekolah Menengah Pertama di Poso. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 394-405.
- Tueno, N. S. (2020). Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru di SMP Negeri 2 Kwandang. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 7(1), 19-28.
- Yudha, A. (2023). Pengaruh tunjangan profesi guru terhadap kinerja dengan Organizational Citizenship Behaviour (OCB) sebagai anteceden pada guru sekolah dasar Wedarijaksa Kabupaten Pati. *COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education)*, 6(3), 537-543.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Yuliani, Y. (2014). Pengaruh Tambahan Perbaikan Penghasilan Daerah dan Tunjangan Profesi terhadap Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Sma/smk di Kabupaten Musi Banyuasin. *Akuntabilitas*, 8(1), 97-114.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).